

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Upaya pemenuhan tujuan pendidikan yang berkaitan langsung dengan peserta didik, membutuhkan kompetensi guru yang mampu menghadirkan jawaban atas kebutuhan belajar peserta didik. Tantangan sekaligus peluang kompetensi guru di era digital dibarengi dengan kurikulum yang bergerak dinamis, dan perkembangan pengetahuan yang menyentuh seluruh bidang keilmuan menjadi sejumlah alasan yang mengharuskan para guru berkewajiban meningkatkan kompetensinya. Ledakan internet yang menghasilkan ledakan perubahan dalam bidang pendidikan¹ berdampak pada peserta didik yang berbeda generasi dari pendidik mengharuskan guru meningkatkan kompetensinya. Statistik Pendidikan 2020 yang ditulis oleh Agustina, dkk., menuliskan bahwa guru yang kompeten merupakan faktor penting yang menjadi perhatian utama dalam sistem pendidikan yang bermutu yang baik dan memiliki daya saing.² Guru yang kompeten menjadi kebutuhan global sebagaimana terdapat dalam dokumen *United Nations Sustainable Development Goals 2030* yang memberi rambu dan tanda pengingat bahwa pada tahun 2030 seluruh pemerintahan negara di dunia harus mampu memberikan jaminan bahwa peserta harus dididik oleh guru yang *qualified*, terlatih, profesional dan memiliki pribadi sebagai motivator yang cakap. Pentingnya faktor guru dalam pendidikan, telah mendorong hampir seluruh bangsa di dunia mengembangkan regulasi yang mempersiapkan peningkatan kompetensi guru dan

¹ Asrul Right and Farida, *Millennial Teachers for Gen-Z* (Yogyakarta: Noktah, 2022), 17.

² Rida Agustina et al., *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2020* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), 23.

profesionalismenya dengan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas.³ Pertimbangan berikutnya tentang perlunya peningkatan kompetensi guru adalah *score* Indonesia pada *The Right to Education Index (RTEI)*⁴ tahun 2021, secara keseluruhan adalah 73%,⁵ lebih rendah dari skor RTEI pada tahun 2018 (86%). Skor untuk masing-masing tema adalah tata kelola 79%, ketersediaan 69%, aksesibilitas 61%, penerimaan 49%, dan adaptasi 62%. Index ini menempatkan Indonesia jauh di bawah Filipina (83%), Palestina (81%) dan satu angka di atas Honduras (72%).⁶

Regulasi pemerintah Republik Indonesia terkait kompetensi guru merupakan rumusan yang harus ditanggapi dengan baik karena hal itu adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 10: “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.”⁷ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

³ Agus Sutikno, “Upaya Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pengembangan Diri,” in *Prosiding “Profesionalisme Guru Abad XXI”, Seminar Nasional IKA UNY* (Yogyakarta: Lumbung Pustaka UNY, 2018), 46, <https://core.ac.uk/reader/189575640>.

⁴ RTEI atau Indeks Hak atas Pendidikan adalah indeks global baru yang dirancang untuk mendorong akuntabilitas dan kemajuan dalam mewujudkan hak atas pendidikan. RTEI bekerja dengan masyarakat sipil, lembaga penelitian dan pemerintah untuk mengumpulkan data tentang berbagai indikator hak untuk pendidikan serta kendala-kendalanya. RTEI memantau kemajuan, mengidentifikasi tren, dan dukungan upaya pemenuhan hak atas pendidikan. Bermitra dengan koalisi masyarakat sipil dalam negeri dan organisasi, proyek mengembangkan dan mengelola kuesioner untuk dilacak dua tahun sekali kemajuan pada indikator utama hak atas pendidikan di tingkat nasional di bidang Pemerintahan dan 4 As (Availability, Accessibility, Acceptability, dan Adaptability) serta sejumlah subtema dan area isu.

⁵ “RTEI by Country,” last modified 2021, accessed April 27, 2023, <https://www.rtei.org/en/explore/rtei-country/?id=ID&year=2021>.

⁶ “Promoting Safe-Inclusive Schools and Empowering Girls to Ensure Equity and Quality in Education,” *Network For Education Watch Indonesia*, last modified 2021, accessed April 27, 2023, www.rtei.org%2Fdocuments%2F692%2FIndonesia_-_RTEI_2021_Country_Brief.pdf/RK=2/RS=nmX_xwyMaHe7CoQYo8bHJN6.vcg-

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, Ps. 1 ayat (10).

Pendidikan dan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, menyebutkan kompetensi guru yang terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.⁸ Lebih lanjut dalam penjelasan PP Nomor 19 tahun 2005 dijelaskan bahwa: “Butir a: Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Butir b: Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Butir c: Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Butir d: Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.”

Keempat kompetensi guru disyaratkan sebagai dasar dalam rangka pengembangan guru sebagai pendidik. Keempat kompetensi tersebut menjadi standar kompetensi guru yang disertai dengan indikator-indikator penilaian terhadap penguasaan guru dalam kompetensi tersebut. Kompetensi-kompetensi guru saling terintegrasi satu dengan lainnya sebagai kelengkapan yang dimiliki guru

⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*, Ps. 28 ayat (3).

demikian terwujudnya kompetensi maksimal seorang guru. Kompetensi-kompetensi tersebut menjadi wujud tanggung jawab profesi seorang guru yang telah menerima pekerjaan menjadi guru mengingat bahwa guru kecakapan guru dalam melaksanakan profesinya berkaitan dengan kompetensi atau profesionalisme yang dimilikinya.⁹ Sartika mengutip pendapat Muzenda bahwa: kompetensi guru dalam aktivitas belajar-mengajar merupakan konsep yang *holistik* yang menjadi ukuran dari berbagai elemen yang saling terkait dengan pengetahuan, keterampilan berkomunikasi, penguasaan materi ajar termasuk pengembangan dan aplikasinya, keterampilan mengajar, kehadiran dan sikap guru di kelas dan di luar kelas.¹⁰

Beberapa penelitian terdahulu menuliskan bahwa adanya kaitan yang erat antara guru yang memiliki kompetensi dengan capaian belajar peserta didik, sama seperti Sutardi menemukan dalam penelitiannya bahwa kompetensi guru memberikan dampak positif terhadap hasil belajar peserta didik.¹¹ Demikian juga Hikmah menemukan bahwa adanya dampak langsung dari kompetensi guru terhadap capaian belajar peserta didik.¹² Sejalan dengan itu, Sulastri juga menemukan bahwa kompetensi profesional guru dapat meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 8 Prabumulih.¹³ Dalam jurnalnya Nua menuliskan

⁹ Nur Rahmat Happy Fitria, Muhammad Kristiawan, "Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru-Guru Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas," *Abdimas Unwahas* 4, No. 1 (2022): 14–25.

¹⁰ Sri Hardianti Sartika, Dadang Dahlan, dan Ikaputra Waspada, "Kompetensi Guru dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Melalui Kebiasaan Belajar Siswa," *Jurnal MANAJERIAL* 17, No. 1, (2018), 39.

¹¹ S. Sutardi dan S. Sugiharsono, "Pengaruh Kompetensi Guru, Motivasi Belajar, dan Lingkungan Keluarga Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi," *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* 3, No. 2, (2016), 188–198.

¹² Nurul Hikmah, "Pengaruh Kompetensi Guru dan Pengetahuan Awal Siswa Terhadap Motivasi Belajar dan Implikasinya Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa," *Indonesian Journal of Economics Education* 1, No. 1, (2018), 9–16, <http://ejournal.upi.edu/index.php/IJEE/article/view/7705>.

¹³ Alfroki Martha, Happy Fitria, Sulastri, "Kompetensi Profesional Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Journal of Education Research* 1, No. 3, (2020), 258–264.

bahwa kompetensi guru berdampak baik pada karakter peserta didik.¹⁴ Sekalipun demikian, persoalan kompetensi guru belum bisa dituntaskan dengan baik. Di beberapa sekolah khususnya Sekolah Dasar (SD) masih terlihat sebaran guru profesional yang belum merata. Menurut data Kemdikbud tahun 2019 guru profesional SD dengan sertifikat pendidik diangka 45,77%.¹⁵ Sementara itu, dalam Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2019, data guru SD bersertifikat pendidik di Kota Jambi masih 46,9%.¹⁶ Sekalipun data tersebut bukanlah merupakan data khusus guru PAK tetapi data tersebut mewakili seluruh guru yang menunjukkan masih pentingnya peningkatan kompetensi profesional guru SD di Kota Jambi.

Data guru PAK SD di Kota Jambi yang bergabung dalam KKG PAK, memiliki status yang berbeda yaitu: dari 41 orang guru PAK, 16 orang di antaranya berstatus PNS, 15 orang memiliki sertifikat pendidik, selebihnya adalah honor dan tenaga sukarela yang dibayar dengan upah rendah dan sebagian belum terdaftar di dapodik.¹⁷ Data tersebut dapat menggambarkan kondisi guru PAK SD di Kota Jambi yang tentunya berkaitan dengan kompetensi profesional guru tersebut. Sementara data lain yang diperoleh dari observasi awal melalui *google form* ditemukan bahwa 92,3% guru PAK Kota Jambi menyatakan perlu untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya secara khusus dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Perlu digarisbawahi bahwa angka tersebut bukanlah kondisi kompetensi keseluruhan guru PAK SD Kota Jambi tetapi

¹⁴ Florentinus Minarta Nua, "Tunjangan Profesi Guru Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Guru dan Karakter Peserta Didik," *EVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen* 9, No. 2 (2020): 250–266.

¹⁵ Kemendikbud, "Jumlah Guru Yang Tersertifikasi Belum Sampai 50%," *Kemendikbud*, last modified 2019, diakses Januari 26, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/guru-sertifikasi-belum-sampai-50>.

¹⁶ Hendarman, ed., *Neraca Pendidikan Daerah 2019* (Jakarta: Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2019), 23 <https://npd.kemdikbud.go.id/?stateid=result>.

¹⁷ Data diperoleh dari pengurus KKG PAK dan Pengawas PAK Kota Jambi, 3 April 2023

khusus dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan beberapa alasan yang dikemukakan, sebagai berikut: 1) Kurikulum Merdeka yang masih baru, 2) Sosialisasi Kurikulum Merdeka yang masih terbatas, 3) Pelatihan Implementasi Kurikulum yang masih kurang. Dengan demikian persoalan kompetensi profesional guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka masih menjadi agenda besar pendidikan yang harus terus dikerjakan di Indonesia khususnya di Kota Jambi.

Kurikulum sebagai sebuah program pendidikan, memberikan pengaruh besar dalam menentukan kondisi pembelajaran, proses pembelajaran dan *output* pendidikan yang pada jangka waktu tertentu berpotensi dalam memengaruhi kualitas hidup sebuah masyarakat. Lembaga pendidikan diharapkan menjadi wadah transformasi pengetahuan yang selalu berkembang dan tempat nilai-nilai budaya dikembangkan yang akan mencerminkan kualitas sebuah satuan pendidikan. Cita-cita pendidikan yang semakin tinggi di Indonesia, diharapkan terpenuhi oleh lembaga pendidikan melalui usaha-usaha pemerintah dan setiap elemen terkait baik negeri maupun swasta sehingga perubahan kurikulum menjadi sesuatu yang tidak terelakkan membawa dampak baik bagi pendidikan. Sebut saja bahwa Kurikulum Pendidikan di Indonesia telah mengalami 10 kali perubahan sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang. Perubahan-perubahan tersebut berpengaruh pada arus pendidikan di sekolah-sekolah di Kota Jambi baik dalam tingkat satuan pendidikan dan tingkat mata pelajaran termasuk Pendidikan Agama Kristen.

Faktor penyebab perubahan kurikulum bukanlah faktor tunggal, tetapi oleh banyak faktor yang saling terkait antar satu dengan lainnya. Faktor-faktor perubahan kurikulum merupakan sesuatu yang sangat kompleks dengan berbagai dasar dan unsur pemicu yang mengharuskan kurikulum mengalami perubahan.

Perubahan kurikulum bukanlah sesuatu yang buruk melainkan sebuah langkah yang diambil untuk perbaikan kualitas pendidikan dan *outputnya* ke depan. Masing-masing perubahan kurikulum didorong oleh berbagai faktor dari internal pendidikan dan faktor eksternal. Muhammedi dalam Ritonga menyatakan: “Faktor politik sering mempengaruhi perubahan kurikulum. Misalnya, kurikulum 1964 disusun untuk meniadakan MANIPOL-USDEK.”¹⁸

Perubahan kurikulum yang diinisiasi pemerintah melalui kementerian pendidikan bukanlah sesuatu yang berjalan mulus dan dapat diterima secara utuh oleh pihak-pihak terkait. Perubahan kurikulum memicu terjadinya perubahan-perubahan lainnya dalam proses pendidikan dan implementasi kurikulum itu sendiri di mana pada tahap ini tidak semua pihak berada dalam posisi siap atau bisa menerima. Di satu sisi ada pihak yang optimis dan bergairah dalam menyambut sebuah kurikulum baru, di pihak lainnya apatisme digaungkan sebagai sikap apriori dan bentuk pesimisme terhadap perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum menuntut perubahan dalam banyak hal, bersamaan dengan itu tidak semua elemen pendidikan terkait kurikulum mau berubah atau siap berubah dalam merespon perubahan sebuah kurikulum dalam pendidikan. Gejala persepsi tentang perubahan kurikulum, distribusi konten kurikulum yang lambat menyentuh daerah-daerah pedesaan, anggaran yang besar untuk perubahan kurikulum dan rentang waktu yang panjang yang dibutuhkan dalam proses implementasi kurikulum dari tingkat pusat yaitu kementerian sampai ke tingkat sekolah menjadi sejumlah masalah dalam perubahan kurikulum.

¹⁸ Maimuna Ritonga, “Politics and Policy Dynamics of Changing the Education Curriculum in Indonesia until the Reformation Period,” *Bina Gogik* 5, No. 2, (2018), 1–15.

Tindak lanjut dari perubahan kurikulum adalah implementasi kurikulum di tingkat sekolah yang bersentuhan langsung dengan peserta didik dan dilaksanakan oleh guru sebagai pendidik termasuk pada kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka menjadi salah satu bagian yang perlu mendapat sorotan dan penanganan serius karena persoalan terbesar dari perubahan kurikulum tidak terletak pada unsur konstruksi sebuah kurikulum seperti: landasan, tujuan, desain, dokumen, dan semua kelengkapan kurikulum tetapi pada bagaimana kurikulum diimplementasikan. Hal ini disebabkan panjangnya proses yang diperlukan tentang bagaimana menurunkan informasi perubahan kurikulum dari pusat ke daerah, kemudian daerah mensosialisasikan ke tingkat sekolah melalui kepala sekolah dan pendidik sebagai pelaksana kurikulum yang bersentuhan langsung dengan peserta didik di dalam pembelajaran. Implementasi kurikulum adalah puncak dari perubahan kurikulum karena desain dan konten kurikulum yang diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan peserta didik belum menjadi apa-apa kalau implementasi kurikulum tidak diwujudkan dengan baik. Hal yang harus dipahami adalah bahwa konten kurikulum yang berubah mengharuskan implementasi yang berbeda terhadap kurikulum tersebut.

Pendekatan-pendekatan yang dapat dijadikan opsi dalam implementasi kurikulum ditingkat sekolah adalah kesiapan sekolah sebagai lembaga dan kesiapan guru sebagai pelaksana menjadi hal penting dalam implementasi kurikulum. Maksud kesiapan sekolah adalah *stakeholder* sekolah yang siap dalam melaksanakan kurikulum mulai dari kesiapan pimpinan dan administrator yaitu kepala sekolah, semua guru dan tenaga kependidikan, fasilitas dan lingkungan sekolah, serta masyarakat di mana satuan pendidikan berada. Sementara maksud

dari kesiapan guru adalah: kesiapan kompetensi, kesiapan psikologis, kesiapan perangkat, dan kesiapan lingkungan kelas yang mendukung guru sebagai ujung tombak pelaksana kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Dengan demikian kemampuan guru dalam mengimplementasikan kurikulum sangat dibutuhkan, karena sebuah kurikulum tanpa implementasi yang tepat tidak akan bermanfaat sebagai alat pendidikan.¹⁹

Tanggung jawab guru sebagai *curriculum implementer* semakin *urgent* mengingat pada saat ini sebagian besar sekolah dasar menengah di Indonesia berada dalam tahap sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Kurikulum merdeka diluncurkan secara daring, sebagai kurikulum terbaru pada 11 Februari 2022 oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi (mendikbudristek).²⁰ Beliau mengatakan kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang jauh lebih singkat, sederhana dan fleksibel yang dapat membantu mengatasi kerugian pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Di samping itu, kurikulum merdeka membantu memperpendek jarak ketertinggalan pendidikan Indonesia dengan negara lain.²¹ Implementasi Kurikulum Merdeka dengan kompleksitasnya membutuhkan usaha keras dari pemerintah dan sekolah serta guru dan dians terkait lainnya. Kompetensi profesional guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka sangat perlu ditingkatkan di tingkat sekolah termasuk di sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi, karena implementasi

¹⁹ Uranus Zamili, "Peranan Guru dalam Pengembangan Kurikulum," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6, no. 2, (2020), 311–318.

²⁰ Deni Hadiansah, *Kurikulum Merdeka dan Paradigma Pembelajaran Baru*, 1st ed. (Bandung: Yrama Widya, 2022), 36.

²¹ Berita Terpopuler, "Luncurkan Kurikulum Merdeka, Mendikbudristek: Ini Lebih Fleksibel!," *Media Center Direktorat Sekolah Dasar*, last modified 2022, diakses September 29, 2022, <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/luncurkan-kurikulum-merdeka-mendikbudristek-ini-lebih-fleksibel>.

kurikulum sejatinya harus terlaksana sampai di tingkat kelas yang dirasakan peserta didik melalui guru. Sehingga kompetensi profesional guru sangat berkaitan erat dengan implementasi kurikulum. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Alawiyah bahwa kompetensi guru sangat berkaitan erat dengan implementasi kurikulum²² karena dalam mengimplementasikan kurikulum di tingkat sekolah membutuhkan banyak proses yang harus dikerjakan oleh seorang guru. Sebaliknya, dari pernyataan Alawiyah dapat diketahui kompetensi profesional yang tidak memadai dari guru akan sangat berdampak terhadap lambannya implementasi kurikulum di tingkat sekolah.

Upaya meningkatkan kompetensi profesional guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, dapat ditempuh dengan berbagai cara, seperti mengikuti pelatihan mandiri atau kolektif secara online atau onsite, belajar bersama dalam *Forum Discussion Group (FGD)*, dan sebagainya, di mana masing-masing cara yang ditempuh memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dari banyak pilihan cara yang tersedia untuk peningkatan kompetensi profesional guru dalam pelaksanaan kurikulum merdeka secara kolektif, forum Kelompok Kerja Guru (KKG) menjadi alternatif pilihan yang memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah forum KKG merupakan forum yang diatur dalam UU pemerintah sebagai wadah para guru SD untuk meningkatkan kompetensinya. KKG merupakan forum yang potensial diberdayakan dalam upaya meningkatkan kompetensi profesional guru, termasuk dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Temuan penelitian tentang peningkatan kompetensi guru melalui forum KKG berbasis

²² F. Alawiyah, "Peran Guru dalam Pengembangan Kurikulum 2013," *Aspirasi* 4, No. 1, (2013), 65–74, <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/480>.

sekolah, dituliskan oleh Indahyani yang menemukan hasil positif.²³ Sipahutar juga menuliskan bahwa kegiatan KKG memiliki pengaruh terhadap mutu pendidikan di SD yang merupakan produk dari guru yang kompeten.²⁴ Demikian juga Sukmawati, ddk., menemukan bahwa didapati adanya pengaruh kehadiran guru pada forum KKG terhadap meningkatnya kompetensi profesional guru.²⁵ Temuan penelitian tersebut membuktikan bahwa KKG adalah forum yang dapat diberdayakan dalam meningkatkan kompetensi guru. Bila dibandingkan dengan kondisi tersebut, maka perlu diadakan penelitian terhadap KKG PAK di Kota Jambi.

KKG PAK Kota Jambi yang terbentuk sejak tahun 2010²⁶ telah menjadi wadah bagi guru-guru dalam mendiskusikan kegiatan pembelajaran. KKG PAK Kota Jambi telah menghasilkan produk pembelajaran berupa perangkat mengajar seperti Rencana Program Pembelajaran (RPP) kurikulum 2013 dan soal ujian di tiap semester serta soal Ujian Akhir Sekolah (UAS) pada kelas IV. Alasan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengetahui bagaimana KKG PAK di Kota Jambi diberdayakan dalam peningkatan kompetensi profesional guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka PAK di SD. Indikator yang dapat diteliti adalah bagaimana tingkat kehadiran anggota, penetapan visi misi dan program yang ditandai dengan kalender kegiatan, sosialisasi dan pelaksanaan program, dokumen

²³ Lilis Indahyani, "Upaya Peningkatan Kompetensi Guru dalam Melaksanakan Penilaian Berpikir Tingkat Tinggi Dengan Penerapan KKG Berbasis Sekolah di SD Negeri Bulukerto 03 Kota Batu Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Kajian Pendidikan dan Inovasi* 4, No. 1, (2021), 81–88, jurnal.fmgmpsmppdisdikkabbogor.com.

²⁴ Desy Lisnawati Sipahutar, "Pengaruh Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG)/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Kristen," *JURNAL AREOPAGUS* 18, No. 2, (2020), 39–49, <http://e-journal.iakntarutung.ac.id/index.php/areopagus>.

²⁵ Aswindirno, Sukmawati, dan Masluyah Suib, "Pengaruh Supervisi Akademik dan Partisipasi Guru dalam KKG Terhadap Kompetensi Profesional Guru SD Kecamatan Sajad," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 6, No. 11, (2017): 1–12, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/22981>.

²⁶ Hasil Dokumentasi, tanggal 21 Juli 2023 di ruangan Bimas Kristen Provinsi Jambi (Lih. lamp. IV).

standar pengembangan dan regulasi yang berlaku seperti tertuang dalam pengembangan KKG dan MGMP,²⁷ serta memenuhi rambu-rambu sebagaimana dituangkan dalam rambu-rambu pengembangan KKG yang diterbitkan oleh Kemendiknas.²⁸

Penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan di atas relevan dengan subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu tentang peningkatan kompetensi profesional guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka melalui pemberdayaan KKG PAK Kota Jambi. Dari beberapa penelitian di atas disimpulkan bahwa kompetensi guru sangat berkaitan erat dengan peserta didik, tetapi belum memaparkan secara runtut bagaimana upaya yang perlu dilakukan agar para guru mengalami peningkatan kompetensinya khususnya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka yang diintegrasikan dengan pemberdayaan Forum KKG. Melihat dari empat kompetensi guru yang dituangkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005, penelitian ini menetapkan fokus pada kompetensi profesional. Dengan demikian *state of the art* dari penelitian ini adalah upaya peningkatan kompetensi profesional guru itu sendiri sehingga memiliki kesiapan dalam melaksanakan tugasnya terkhusus dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka sebagai kurikulum terbaru dalam pendidikan di Indonesia yang diupayakan melalui KKG. Mengingat hasil penelitian kualitatif tidak bisa generalisasikan maka dapat dipastikan tidak ada unsur plagiarisme pada penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

²⁷ Ditjen PMPTK, *Standar Pengembangan KKG dan MGMP* (Jakarta: Direktorat Profesi Pendidik, 2008), 7.

²⁸ Kemendiknas Direktorat Profesi Pendidik, *Rambu-Rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP* (Jakarta: Dirjen PMPTK, 2010), 14.

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan judul: *“Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Kristen dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka SD Melalui Pemberdayaan KKG PAK Kota Jambi.”*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi profesional guru PAK Sekolah Dasar di Kota Jambi masih kurang sebab masih minimnya pelatihan dari dinas dan kementerian.
2. Guru PAK SD bersertifikat pendidik di Kota Jambi belum mencapai 50%.
3. Implementasi Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya dipahami oleh para guru PAK Sekolah Dasar di Kota Jambi sehingga belum dapat mengimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan.
4. Pemberdayaan KKG PAK di Kota Jambi belum optimal karena pengelolaan dan pengembangan belum sesuai dengan standar yang dibuat oleh pemerintah.
5. Program kegiatan pada KKG PAK di Kota Jambi belum sesuai dengan regulasi yang berlaku karena keterbatasan pengurus dalam menuangkan agenda kegiatan dalam kalender program.
6. Guru honor PAK SD di Kota Jambi masih banyak dan menerima upah rendah karena persoalan status guru dan keterbatasan anggaran pada satuan pendidikan.

C. Batasan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan waktu, keterbatasan dana dan keterbatasan pengetahuan sehingga masalah penelitian yang akan diteliti perlu dibatasi. Dari identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru PAK SD dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka melalui pemberdayaan KKG PAK di Kota Jambi.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya peningkatan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Kristen Sekolah Dasar di Kota Jambi?
2. Bagaimana implementasi Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen Sekolah Dasar di Kota Jambi?
3. Bagaimana pemberdayaan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Kristen dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Kristen Sekolah Dasar di Kota Jambi?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui upaya peningkatan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Kristen Sekolah Dasar di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui implementasi Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen Sekolah Dasar di Kota Jambi.

3. Untuk mengetahui pemberdayaan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Kristen dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Kristen Sekolah Dasar di Kota Jambi.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini dijabarkan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya adalah menjadi literatur yang menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan pentingnya kompetensi guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Kemudian, penelitian ini diharapkan menjadi referensi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kurikulum dan KKG dengan pemberdayaannya. Bersamaan dengan itu secara praktis penelitian ini bermanfaat:

1. Bagi Universitas Kristen Indonesia

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi UKI, secara khusus bagi Prodi Magister Pendidikan Agama Kristen untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran secara khusus dalam mata kuliah desain kurikulum, pengembangan kurikulum, dan Manajemen PAK di Sekolah. Penelitian ini ini dapat juga menjadi referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan KKG PAK.

2. Bagi KKG PAK Kota Jambi

Sebagai sebuah karya ilmiah, hasil penelitian ini menjadi bahan referensi bagi ketua, anggota KKG PAK Kota Jambi yang bermanfaat sebagai bahan pemberdayaan KKG untuk peningkatan kompetensi guru.

3. Pengawas PAK Kota Jambi

Pelaksanaan penelitian yang dipusatkan di Kota Jambi, bersentuhan dengan pengawas PAK Kota Jambi. Penelitian ini bermanfaat sebagai bukti pelaksanaan peningkatan kompetensi guru PAK melalui pemberdayaan KKG PAK Kota Jambi yang berada di wilayah binaannya sebagai pengawas guru PAK.

4. Bagi guru-guru PAK

Penelitian dengan fokus kompetensi profesional guru PAK dan kurikulum PAK ini, dapat memberi manfaat sebagai sumber belajar bagi guru-guru PAK dalam menambah wawasan dalam menjalankan tugas keguruannya.

5. Bagi Mahasiswa prodi PAK

Sebagai hasil penelitian mahasiswa magister PAK, maka penelitiannya ini dapat menjadi referensi tugas mahasiswa khususnya prodi PAK.

6. Bagi peneliti bidang PAK

Penelitian ini dapat menjadi dapat dimanfaatkan menjadi acuan untuk penelitian berikutnya oleh para peneliti bidang PAK.

G. Sistematika Penulisan

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II berisi landasan teori yang terdiri dari: peningkatan kompetensi, indikator kompetensi profesional guru, implementasi kurikulum merdeka, pemberdayaan KKG PAK. Bab III berisi metode penelitian yang terdiri dari: design penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tehnik dan pengumpulan data, informan penelitian, tehnik analisis data. Bab IV berisi hasil penelitian yang terdiri

dari: gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data, dan refleksi.

Bab V berisi kesimpulan dan saran.

